

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, intensitas interaksi pemerintah dengan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting. Selama ini, program penataan ruang yang dilaksanakan pemerintah belum optimal menyentuh masyarakat di seluruh pelosok wilayah dan aspirasi masyarakat pun kurang terakomodir. Hal ini disebabkan oleh jangkauan dinas yang terlalu jauh dan kurangnya personil. Namun pembentukan cabang dinas baru dan penambahan jumlah personil akan menambah biaya. Pemerintah daerah memiliki satuan yang membawahi suatu wilayah sehingga dekat dengan masyarakat yaitu kecamatan. Lokasi yang dekat dan intensitas interaksi dengan masyarakat yang tinggi memungkinkan kecamatan difungsikan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Studi ini bertujuan untuk merumuskan model fungsionalisasi kecamatan sebagai penyelenggara penataan ruang. Fungsionalisasi kecamatan menyangkut pelimpahan wewenang penataan ruang dari dinas ke kecamatan. Pelimpahan wewenang harus mempertimbangkan karakteristik wewenang dan kapasitas lembaga serta karakteristik wilayah. Untuk memudahkan analisis ditentukan dua model hipotetik, yaitu Model Hipotetik I dan Model Hipotetik II. Untuk mencapai tujuan penelitian, terdapat beberapa analisis yang dilakukan antara lain : Analisis Karakteristik Wewenang Penataan ruang di Kabupaten Banjarnegara, Analisis Kapasitas Kelembagaan Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Analisis Penentuan Model Kecamatan, Analisis Delphi, dan Analisis SWOT.

Berdasarkan Hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa model yang tepat adalah model Hipotetik I dengan sedikit penambahan Fasilitas dan Perijinan. Kecamatan difungsikan sebagai pelaksana pengendalian dan pembinaan melalui sosialisasi, penyebaran informasi dan pengawasan. Selain itu kecamatan juga diberi wewenang fasilitas dalam penelitian dan perencanaan serta wewenang perijinan untuk skala kecamatan. Berdasarkan penelitian ini maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu mempertimbangkan fungsionalisasi kecamatan dengan pelimpahan wewenang dan pelimpahan SDM, Sarpras dan Anggaran sehingga penyelenggaraan penataan ruang dapat lebih optimal.

Kata kunci : model, penyelenggaraan penataan ruang, fungsionalisasi kecamatan, pelimpahan wewenang